





FORUM KOMUNIKASI 14 KEMANTREN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Tema: Updating Data Kependudukan Dalam Sistem Tertib Administrasi

DOK. PEMKOT YOGYA

Didukcapil Dorong Warga Laporkan Perubahan Data Penduduk

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogya mendorong aparaturnya di tingkat kemantren dan kelurahan untuk meningkatkan upaya sosialisasi terkait pelaporan updating administrasi kependudukan.

Bukan tanpa sebab, ketika masyarakat tertib administrasi, maka kualitas data kependudukan skala kota maupun nasional pun otomatis akan meningkat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogya, Septi Sri Rejeki, menyampaikan, dampak dari peningkatan kualitas data akan mempermudah stakeholder dalam pemanfaatan data kependudukan seperti perencanaan pembangunan, pelayanan publik, penegakan hukum, dan pelaksanaan demokrasi.

"Jadi, pentingnya update data itu ketika nanti ada warga masyarakat yang data-datanya anomali atau memang ada kekeliruan," ujarnya, di sela Forum Komunikasi 14 Kemantren, Selasa (30/5).

"Updating data untuk memberikan kevalidan dan kepastian, bahwa warga masyarakat tersebut masih ada di sana, bahkan menyangkut pemberian bantuan atau program-program pemerintah," tambah Septi.

Septi menyebutkan, masyarakat bisa memanfaatkan inovasi pelayanan yang digulirkan. Didukcapil untuk melaporkan perubahan data kependudukan, seperti via *Jogja Smart Service* (JSS), Anjungan Dukcapil Mandiri, hingga program *drive thru* dan pelayanan jemput bola.

Untuk Anjungan Dukcapil Mandiri, lanjutnya, sejauh ini telah teralisasi di tiga lokasi sekaligus, meliputi Kantor Kemantren Jetis, Mergangsari, dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya.

"Rencananya, tahun ini kita bisa menambah lagi Anjungan Dukcapil Mandiri, agar masyarakat bisa bebas mau mencetak dokumen kependudukannya di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya," ungkapnya.

Di samping itu, instansinya juga memiliki program jemput bola untuk penyandang disabilitas, ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa), kaum lanjut usia dan kalangan rentan. "Untuk yang jemput bola, kami mendapat laporan dari RT, RW, lurah, atau mantri, dengan mengirim surat permohonan dan diberi tahu kondisi di wilayahnya," jelasnya.

"Misal, di wilayahnya ada warga disabilitas, ODGJ, atau masyarakat rentan, sehingga kami bisa melakukan perekaman di rumah, di kantor kemantren, atau kelurahan," pungkasi Septi. (aka)

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005